

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses pembangunan yang mencakup sebuah perubahan untuk mencapai tujuan. Pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan seperti adanya peningkatan pendapatan perkapita. Indonesia adalah Negara yang sedang mengalami proses untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan dalam waktu jangka panjang (Hudiyanto, 2017:1). Keberhasilan pembangunan suatu Negara dilihat dari segi kesejahteraan rakyat yang artinya rakyat bisa merasakan kehidupan yang layak artinya bebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan tolak ukur dari kondisi perekonomian suatu negara yang bisa menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di setiap wilayah karena semakin tingginya angka kemiskinan akan menimbulkan banyak masalah.

Negara Indonesia adalah Negara yang berkeadilan, bersatu, dan maju untuk mencapai kesejahteraan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sehingga pembangunan harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan dimana masyarakat Indonesia dapat hidup secara layak atau bebas dari kemiskinan (Rahayu, 2018). Kemiskinan akan menjadi alat ukur keberhasilan suatu pembangunan.

Tingginya tingkat kemiskinan akan menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pengangguran di

wilayah yang cukup tinggi. Menurut World Bank, pada tahun 1976 Indonesia berhasil mengurangi angka jumlah kemiskinan sehingga pada tahun 1987 angka kemiskinan di Indonesia menjadi 17,42%.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di dunia, baik di Negara maju atau di Negara yang sudah berkembang. Kemiskinan merupakan orang yang tidak mampu memenuhi kehidupannya secara layak. Kemiskinan merupakan masalah yang belum bisa terpecahkan hampir di wilayah Indonesia. Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah kemiskinan yang relatif tinggi sehingga perlu diketahui apa penyebab dari kemiskinan tersebut dan bisa mencari solusi untuk menurunkan kemiskinan tersebut.

Masalah kemiskinan didalam islam di pandang sebagai masalah yang sangat membahayakan karena sangat dekat dengan kekufuran, dengan masalah kemiskinan masyarakat akan hidup secara tidak tenang karena akan mengganggu ibadah dan kewajibannya agama islam secara maksimal, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018).

Islam melarang untuk meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah baik dari segi agama atau ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. An-Nisa':9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) mereka, dan hendaklah mereka

bertakwa kepada allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar “(Q.S. An- Nisa’:9).

Menurut Ibnu Katsir keturunan yang lemah sangat identik dengan kekurangan harta, pesan Rasulullah Kepada Sa’ad Abi Waqash ketika ingin meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan yang berkecukupan (Katsir, 1999:22 dalam Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Maka dapat disimpulkan dari ayat (Q.S. An- Nisa’:9) bahwa kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa di abaikan.

Kemiskinan adalah masalah yang dapat dipengaruhi oleh bermacam macam faktor seperti tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya pertumbuhan perekonomian sehingga akan menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh faktor pendidikan salah satunya, ketidakmerataan pembangunan ekonomi dapat menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Kemiskinan muncul karena adanya masyarakat yang kekurangan dari segi kesehatan, pendidikan, akses informasi dan masih banyak lainnya.

Sering terjadi di kota-kota yang berada di Indonesia banyak masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak karena kurangnya biaya sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa meningkatkan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki penghasilan.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk miskin Indonesia
Tahun 2007- 2017

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2010-2019 (Juta Orang)				Persentase Penduduk Miskin Indonesia 2010-2019 (Persen)		
Tahun	Kota	Desa	Kota- Desa	Kota	Desa	Kota-Desa
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66
2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47
2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96
2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13
2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70
2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12
2018	10,13	15,54	25,67	6,89	13,10	9,66
2019	9,86	14,93	24,79	6,56	12,60	9,22

S

umber: Badan pusat statistik

Hasil dari tabel diatas bahwa presentase kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan, pada September 2019 tingkat persentase kemiskinan di kota sebesar 6,56 persen atau berjumlah 9,86 juta penduduk miskin, sedangkan persentase di desa sebesar 12,60 persen atau 14,93 juta penduduk miskin. Pada tahun 2010 -2018 jumlah penduduk miskin dipedesaan lebih cepat dari perkotaan. Pada tahun 2014 -2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang sangat lambat bahkan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin malah meningkat.

Kemiskinan dapat dilihat dari keadaan masyarakat dengan melihat keadaan tingkat ekonominya yang lemah dan kebijakan pemerintah yang harus di arahkan untuk memecahkan masalah dalam waktu jangka pendek, kondisi masyarakat yang tidak bisa mengikuti proses dalam perubahan

karena tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki faktor produksi dengan kualitas yang baik sehingga tidak dapat mendapatkan hasil dari proses pembangunan tersebut. Kemiskinan dapat di sebabkan oleh sifat kultural (Subandi, 2016: 77 -78).

Faktor utama penyebab kemiskinan terdapat pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya ketidaksempurnaan yang terdapat di pasar dan berkurangnya modal dapat menyebabkan rendahnya produktivitas, rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan. Kemiskinan secara ekonomi mikro muncul karena terjadinya ketimpangan pendapatan atau adanya perbedaan pada pola kepemilikan sumberdaya, karena penduduk miskin memiliki sumberdaya dengan kualitas yang rendah atau terbatas, kedua kemiskinan muncul karena terdapat perbedaan dalam kualitas sumber daya. Sumber daya yang rendah akan menghasilkan produktivitas dan upah yang rendah. Sumber daya yang rendah disebabkan oleh pendidikan yang rendah dan akan munculnya diskriminasi, yang ketiga kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 1997: 107).

Mengukur indikator pembangunan tersebut tidak hanya di ukur dengan ekonomi saja tetapi dengan mempertimbangkan panjang umur manusia, pendidikan dan standar hidup yang berkecukupan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama terjadinya kemiskinan (Hudiyanto, 2017: 48 - 49).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut data Badan Pusat Statistik dalam waktu 5 tahun Provinsi Lampung menempati urutan ketiga kemiskinan tertinggi, Provinsi Lampung menempati urutan ketiga dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Lampung masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera, salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung ketidakmerataan pembangunan.

Tabel 1. 2
Persentase Penduduk Miskin Di Pulau Sumatera
Tahun 2015-2019 (Persen)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	17,08	16,73	16,89	15,97	15,32
Sumatera Utara	10,45	10,35	10,22	9,22	8,83
Sumatera Barat	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42
Riau	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08
Jambi	8,86	8,41	8,19	7,92	7,60
Sumatera selatan	14,25	13,54	13,19	12,80	12,71
Bengkulu	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23
Lampung	14,35	14,49	13,69	13,14	12,62
Bangka Belitung	5,40	5,22	5,20	5,25	4,62
Kep Riau	6,24	5,98	6,20	6,06	5,90

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 kemiskinan menjadi 12,62 persen. Jika dilihat dari segi kondisi geografis Provinsi Lampung terletak pada pusat utama keluar masuknya kegiatan ekonomi karena terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Maka Provinsi Lampung mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu meningkatkan pendapatannya sehingga dapat mengurangi jumlah

kemisikinan, akan tetapi ini Provinsi Lampung malah menempati urutan ketiga penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera. Keberhasilannya pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk miskinnya suatu daerah tersebut dan kesejahteraan penduduk.

Tabel 1. 3
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Lampung
Tahun 2015 -2019)

No	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
1	Lampung Barat	42,20	44,90	42,71	40,62	39,05
2	Tanggamus	81,60	81,31	77,53	73,77	71,90
3	Lampung Selatan	157,70	158,38	150,11	148,53	144,44
4	Lampung Timur	170,10	172,61	167,64	162,94	158,90
5	Lampung Tengah	164,40	165,67	162,38	160,12	153,90
6	Lampung Utara	140,40	139,50	131,78	128,02	122,65
7	Way kanan	63,10	63,64	62,00	60,16	58,72
8	Tulang Bawang	44,20	44,26	44,31	43,10	42,06
9	Pesawaran	75,40	74,45	71,64	70,14	67,36
10	Pringsewu	45,60	45,72	44,41	41,63	40,55
11	Mesuji	16,00	15,74	15,16	15,01	14,94
12	Tulang Bawang B	21,80	22,39	21,77	21,93	21,14
13	Pesisir Barat	24,00	24,20	23,76	22,98	22,38
14	Bandar Lampung	100,80	100,54	100,50	93,04	91,24
15	Metro	16,20	16,26	16,06	15,06	14,49
	Provinsi Lampung	1 163,50	1 169,60	1 131,73	1 097,05	1 063,66

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut data dari badan pusat statistik diatas bahwa Provinsi Lampung memiliki 15 Kabupaten dimana terdapat 5 Kabupaten yang mengalami jumlah kemiskinan yang cukup tinggi yakni Kabupaten Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah dan jumlah angka kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan.

Berbagai faktor yang mengurangi jumlah kemiskinan seperti halnya pengeluaran pemerintah yang dialokasikan secara khusus dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah

Minimum Kabupaten. Kesehatan dan pendidikan yang layak dapat mempengaruhi kinerja seseorang, sehingga apabila kondisi kesehatan dan pendidikan yang buruk dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Lampung sudah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan salah satunya menggunakan pengeluaran pemerintah dan mengalokasikan pada bidang kesehatan dan pendidikan karena salah satu upaya untuk meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yaitu pendidikan dan kesehatan, karena kurangnya kualitas pada produktivitas Sumber daya manusia dapat memicu kemiskinan. Pemerintah harus melakukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal yang dapat dialokasikan terhadap anggaran belanja khusus terhadap penduduk miskin.

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan investasi, dapat membuka peluang, meratakan distribusi pendapatan dan memelihara kestabilan ekonomi (Khalimah, 2019). Pengeluaran Pemerintah dapat dialokasikan pada belanja dalam bidang pendidikan dan kesehatan karena dapat meningkatkan pemberdayaan kualitas manusia, produktivitas penduduk dan indeks pembangunan manusia, masyarakat memiliki modal untuk menuju kehidupan yang lebih baik, semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka akan memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan (Makahanap, Naukoko & wauran, 2014).

Berdasarkan data Pengeluaran pemerintah pada tahun 2015-2019 untuk bidang kesehatan maupun bidang pendidikan setiap tahunnya bertambah, artinya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan belum berhasil karena jumlah kemiskinan masih terus bertahun setiap tahunnya.

Tabel 1. 4
Realisasi Pengeluaran Pemerintah 5 Kabupaten di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Bandar Lampung	37.862,864	46.305,086	91.825,043	10.173,397	80.302,804
Lampung Tengah	35.433,442	60.722,461	72.414,388	75.517,858	68.116,553
Lampung Utara	31.986,521	46.182,543	44.484,200	46.972,362	36.444,669
Lampung Selatan	37.121,530	56.963,288	64.609,942	66.576,469	65.389,643
Lampung Timur	37.160,796	54.391,684	50.514,640	61.188,371	56.153,654

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah di 5 Kabupaten di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami naik turun yaitu di Kabupaten Bandar lampung pada tahun 2015 sebesar 37.862,864 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 80.302,804 juta rupiah, di Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2015 sebesar 35.433,442 juta rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 68.116,553 juta rupiah, di Kabupaten Lampung utara pada tahun 2015 sebesar 31.986,521 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 46.972,362 juta rupiah akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 36.444,669 juta rupiah, pada Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2015 sebesar 37.121,530 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 65.389,643 juta rupiah, dan pada Kabupaten Lampung timur sebesar 37.607,96 juta rupiah dan mengalami

kenaikan pada tahun 2018 sebesar 61.188,371 juta rupiah akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 56.153,65 juta rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan karena indikator kinerja perekonomian suatu daerah kabupaten / kota dapat dilihat dari nilai PDRB, karena Produk Domestik Produk menjadi indikator dari pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB yang tinggi seharusnya diimbangi dengan pemerataan pembangunan ekonomi dan menandakan tingginya pendapatan masyarakat karena semakin banyak jumlah pekerjaan (Baihaqi & Puspitasari, 2020).

Pendapatan yang meningkat dapat dilihat dari peningkatan Produk Nasional Bruto di dalam skala nasional sedangkan skala daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah indikator untuk melihat tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah (Budhi, 2013). Menurut Badan Pusat Statistik PDRB adalah nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah domestik yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) lapangan usaha menurut harga konstan digunakan untuk mengukur sebuah pertumbuhan ekonomi sehingga semakin tingginya hasil produktivitas pada setiap wilayah mampu memberikan dampak secara negatif terhadap kemiskinan. Nilai Produk domestik regional bruto di Provinsi Lampung setiap tahun nya meningkat terutama pada 5 Kabupaten di Provinsi Lampung dengan jumlah kemiskinan yang paling tinggi adalah Bandar

Lampung, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Timur dari 15 kabupaten di Provinsi Lampung. Peran terbesar untuk membentuk nilai PDRB adalah lapangan usaha menurut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 1. 5
PDRB 5 Kabupaten/Kota Di Provinsi Atas Harga Konstan
Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Bandar Lampung	30.873,559	32.859,032	34.921,075	37.084,487	39.385,645
Lampung Tengah	38.773,799	40.949,374	43.107,048	45.456,324	47.973,695
Lampung Utara	13.458,838	14.145,711	14.882,707	15.675,555	16.515,056
Lampung Selatan	24.654,678	25.942,709	27.359,532	28.797,836	30.377,169
Lampung Timur	25.151,473	26.292,188	27.496,839	28.518,177	29.606,131

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nilai PDRB harga konstan terus meningkat di kabupaten Bandar Lampung Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 30.873,559 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 39.385,645 juta rupiah, nilai PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015 sebesar 38.773,799 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 47.973,695 juta rupiah, nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2015 sebesar 13.458,838 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 16.515,956 juta rupiah, nilai PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2015 sebesar 24.654,678 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 30.277,168 juta rupiah, dan nilai PDRB Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2015 sebesar 25.151,473 juta rupiah dan mengalami

kenaikan pada tahun 2019 menjadi 29.606,131 juta rupiah Hal ini harus sebanding dengan kontribusi PDRB seharusnya dapat mengurangi dalam jumlah kemiskinan.

Tabel 1. 6
Pertumbuhan PDRB 5 Kabupaten/Kota Di Provinsi
Atas Harga Konstan Tahun 2015- 2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Bandar Lampung	6.33	6.43	6.28	6.21	6.24
Lampung Tengah	4.58	4.23	5.27	5.45	5.46
Lampung Utara	5.43	5.1	5.21	5.33	5.36
Lampung Selatan	5.38	5.22	5.46	5.26	5.14
Lampung Timur	5.38	5.33	4.58	3.78	3.85

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari tabel 1.6 bahwa pertumbuhan PDRB di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rendahnya produktifitas sumber daya manusia akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang tercermin pada nilai PDRB per kapita. Penyebab kemiskinan karena rendahnya produktivitas karena adanya keterbelakangan dan ketinggalan produktivitas SDM (Kuncoro, 1997-107).

Upah minimum Kabupaten merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Upah merupakan suatu penerimaan berupa imbalan dalam suatu pekerjaan atau jasa yang sudah dilakukan. Upah digunakan sebagai jaminan kelangsungan hidup seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, upah diterapkan menurut suatu jenis pekerjaan dan sudah disepakati perjanjian diawal. Upah minimum digunakan untuk mengangkat derajat masyarakat yang pendapatan rendah atau masyarakat miskin, upah

minimum yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan yang terjamin dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi masyarakat meningkat maka akan membuat lapangan usaha baru, dan akan memiliki pengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan (Islami & Anis, 2019). Untuk membangun kualitas sumber daya manusia tenaga kerja harus diperhatikan dalam membangun sebuah perekonomian, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting selain sumber daya alam, teknologi dan modal. Tenaga kerja yaitu menyangkut kehidupan manusia untuk bekerja sehingga menghasilkan barang dan jasa sehingga akan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Tabel 1.7
Upah Minimum Kabupaten 5 Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Bandar Lampung	1.649,00	1.870,000	2.054,365	2.263,390	2.445,141
Lampung Tengah	1.588,000	1.770,620	1.916,696	2.083,640	2.225,956
Lampung Utara	1.588,000	1.763,000	1.912,670	2.100,000	2.268,750
Lampung Selatan	1.595,000	1.800,500	1.973,798	2.168,702	2.365,835
Lampung Timur	1.581,000	1.763,100	1.908,556	2.074,800	2.241,406

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Jika dilihat dari tabel 1.7 menunjukkan bahwa upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Upah minimum kota Bandar Lampung pada tahun 2015 sebesar 1.649,000 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2.445,141, upah minimum kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015

sebesar 1.558,000 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.225,956, upah minimum kabupaten Lampung Utara pada tahun 2015 sebesar 1.588,000 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.268.750, upah minimum kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2015 sebesar 1.595,000 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.365,835, dan upah minimum kabupaten Lampung timur pada tahun 2015 sebesar 1.581,000 kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.241,406. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi Tahun 2013-2016” Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode *Ordinary Least Squares (OLS)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Indeks Pembangunan manusia (IPM). PDRB perkapita dan jumlah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. variable IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB berhubungan signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan pengangguran Berperngaruh signifikan Positif terhadap jumlah penduduk miskin. Persamaan penelitian terdapat pada variabel PDRB perbedaan peneliti menggunakan variabel Pengeluaran Pemerintah dan UMK dan menggunakan studi kasus 5 Kabupaten di Provinsi Lampung. dan peneliti menggunakan metode regresi data panel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Makahanap, Naukoko & Waura, (2014) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe” Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda. Hasil dari penelitian Ini Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan. Persamaan peneliti menggunakan variabel Pengeluaran pemerintah dan perbedaan pada peneliti adalah menggunakan variabel PDRB dan UMK peneliti menggunakan studi kasus 5 kabupaten di Provinsi Lampung dan peneliti menggunakan metode regresi data panel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan & Ihsan, (2018) yang berjudul “Anlisis Pengaruh UMP, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh” Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di aceh. Persamaan peneliti menggunakan variabel Upah Minimum dan perbedaan pada peneliti adalah menggunakan variabel PDRB dan Pengeluaran pemerintah peneliti menggunakan studi kasus 5 kabupaten di Provinsi Lampung dan peneliti menggunakan metode regresi data panel.

Berdasarkan Latar Belakang yang di uraikan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Upah Minimum Kabupaten terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2010- 2019 (Studi

Kasus 5 kabupaten di Lampung). Tingginya jumlah kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Upah Minimum Kabupaten.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu: Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Upah Minimum Kabupaten, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010- 2019 (Studi Kasus 5 Kabupaten di Lampung). Adapun variabel yang akan digunakan untuk membuat batasan masalah tersebut terdapat 2 variabel. Variabel Dependen adalah kemiskinan dan Variabel Independen Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Upah Minimum Kabupaten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Produk Domestik Regional Bruto, dan Upah Minimum Kabupaten terhadap kemiskinan kabupaten/kota Di Provinsi Lampung. Maka dalam penulisan penelitian ini akan menggulas tetang hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh atau tidak terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2019?
2. Bagaimana PDRB memiliki pengaruh atau tidak terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2019?

3. Bagaimana Upah Minimum Kabupaten memiliki pengaruh atau tidak terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten/Kotadi Provinsi Lampung tahun 2010-2019?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel dependen dan independen sbagai berikut:

1. Untuk menganalisis Tingkat Pengeluaran Pemerintah apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2010-2019.
2. Untuk menganalisis PDRB apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2010-2019.
3. Untuk menganalisis Upah Minimum Kabupaten apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap kemiskinan di 5 Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2010-2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi Lampung sehingga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung bisa terjamin.

2. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan khususnya didalam ekonomi pembangunan dan bisa menjadi bahan acuan untuk peneliti-peneliti yang akan datang untuk membahas tentang kemiskinan

